

BAB I

PENDAHULUAN

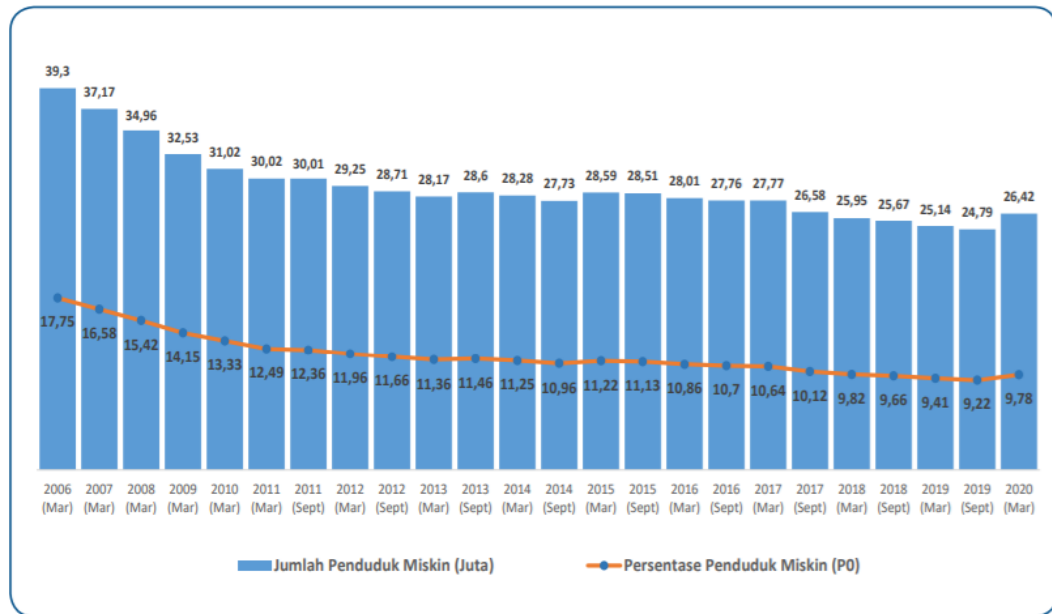
1.1 Latar Belakang

Dalam sebuah negara yang berkembang seperti negara Indonesia pasti akan di jumpai masalah-masalah yang kompleks untuk ditangani dan terkadang bisa menjadi penghambat jalan untuk menuju tahap selanjutnya seperti menjadi negara maju. Salah satu permasalahan yang menjadi prioritas pemerintah adalah kemiskinan. Tidak ada persoalan yang lebih besar selain persoalan kemiskinan. Kemiskinan telah membuat jutaan anak-anak tidak bisa mengenyam pendidikan yang berkualitas, kesulitan membiayai kesehatan, kurangnya akses ke pelayanan publik, dan yang lebih parah, kemiskinan menyebabkan jutaan rakyat memenuhi kebutuhan pangan, sandang dan papan secara terbatas. Masalah kemiskinan ini bukan hanya dialami oleh negara yang sedang berkembang saja, bahkan sebuah negara yang maju pun memiliki permasalahan ini, namun tidak separah yang dialami oleh negara yang sedang berkembang.

Menurut BPS (2007) terdapat indikator utama masyarakat dapat dikatakan miskin jika salah satu berikut ini terpenuhi seperti; (1) Terbatasnya kecukupan dan mutu pangan; (2) Terbatasnya akses dan rendahnya mutu layanan kesehatan; (3) Terbatasnya akses dan rendahnya mutu layanan pendidikan; (4) Kurangnya kesempatan kerja; (5) Lemahnya perlindungan terhadap asset usaha dan perbedaan upah; (6) Terbatasnya kebutuhan dasar (sandang, pangan dan papan); (7) Terbatasnya akses terhadap air bersih; (8) tidak adanya tabungan; (9) Memburuknya kondisi lingkungan hidup dan SDA; (10) tidak adanya asuransi dan

jaminan sosial; (11) tidak adanya partisipasi; (12) Meluasnya korupsi dan lemahnya jaminan rasa aman

Gambar 1.1. Presentase dan jumlah penduduk miskin Indonesia



Sumber : BPS Indonesia, 2021

Dari gambar diatas dapat diambil keterangan bahwa dari tahun 2011 hingga tahun 2019 jumlah penduduk maupun presentase kemiskinan di Indonesia selalu menurun walau tidak signifikan, akan tetapi di tahun 2020 angka kemiskinan kembali naik sekitar 2 (dua) juta penduduk miskin. Ada beberapa kebijakan pemerintah Indonesia untuk mengatasi kemiskinan, yaitu BLT (Bantuan Langsung Tunai), Raskin (Beras Miskin), dan Subsidi BBM.

Dalam menurunkan jumlah dan persentase penduduk miskin, salah satu program yang dilakukan oleh pemerintah adalah program Bantuan Langsung Tunai (BLT). Program ini pertama kali diluncurkan pada tahun 2005 berupa kucuran bantuan tunai sebesar 1,2 juta setiap tahunnya untuk mengurangi dampak dari pencabutan subsidi bahan bakar minyak (BBM) pada rumah tangga miskin (World

Bank 2017). Program ini menargetkan 30% dari rumah tangga termiskin di Indonesia, yang mencakup sekitar 15 sampai 19 juta rumah tangga. Hal tersebut menjadikan program BLT menjadi salah satu program bantuan sosial terbesar di dunia (Izzati *et.al.* 2020).

Adapun kebijakan ini merupakan tanggung jawab langsung dari pemerintah pusat, dengan Kementerian Keuangan sebagai pengatur dana yang akan dikeluarkan pemerintah pusat untuk Bantuan Langsung Tunai (BLT) kepada masyarakat diseluruh Indonesia. Kebijakan atau program lain dari pemerintah yang semisal BLT adalah Raskin (Beras Miskin). Program raskin merupakan wujud nyata komitmen pemerintah dalam pemenuhan kebutuhan pangan bagi masyarakat miskin yang sekaligus untuk mengurangi beban pengeluaran rumah tangga miskin, sesuai Peraturan Presiden RI No. 13 tahun 2009, tentang Koordinasi penanggulangan kemiskinan, yang didukung oleh Kepmenko Kesra No. 35 tahun 2009 tentang tim koordinasi Raskin Pusat. Disamping itu, juga dimaksudkan untuk meningkatkan akses masyarakat miskin dalam pemenuhan kebutuhan pangan pokok sebagai salah satu hak dasar masyarakat.

Dari hasil penelitian sebelumnya , kebijakan Raskin belum berjalan sesuai dengan sasaran program. Pada kenyataannya implementasi kebijakan Raskin tidak selalu berpedoman penuh pada prosedur kebijakan karena tergantung pada kondisi dan situasi masyarakat setempat. Banyak pelaksanaan yang tidak sama dengan tujuan yang ada pada Pedoman Umum/Petunjuk Pelaksanaan Raskin. Padahal program ini memiliki tujuan untuk mengurangi beban pengeluaran RTS melalui pemenuhan sebagian kebutuhan pangan pokok dalam bentuk beras. Selain itu untuk program juga bertujuan untuk meningkatkan ketahanan pangan di tingkat rumah

tangga sasaran, sekaligus sebagai mekanisme perlindungan sosial dan penanggulan kemiskinan. Jika diterima secara utuh, alokasi 15 kg beras per bulan akan dapat mengurangi kemiskinan sekitar 1,22% (P4S, Bappenas, 2013).

Penyimpangan yang kerap terjadi yaitu tidak tepatnya jumlah beras yang diperoleh para Rumah Tangga Miskin (RTM) penerima manfaat Raskin, yang seharusnya berdasarkan PAGU Raskin setiap RTM menerima beras sejumlah 15 kg tetapi yang diperoleh hanya sekitar 5 kg per RTM/RTS. Hal itu terjadi karena keterbatasan beras yang jumlahnya lebih sedikit dari jumlah warga yang menerima Raskin sehingga menyebabkan mayoritas masyarakat merasa senang namun sebagian kecil juga ada yang merasa tidak puas karena tidak sesuai dengan kebutuhan mereka.

Kebijakan selanjutnya dari pemerintah untuk mengatasi kemiskinan adalah dari sektor migas, dengan memberikan subsidi LPG 3 Kg. Menjalankan kebijakan penggunaan gas LPG pemerintah harus efektif dalam pemberian gas LPG 3 kg bersubsidi dimana komoditi ini menyangkut hajat hidup orang banyak. Berdasarkan Undang-undang No 27 Tahun 2001 Tentang kegiatan usaha hilir gas, seluruh bisnis minyak dan gas LPG sudah terbuka bagi pelaku usaha maupun kondisi di pasar yang menunjukkan bahwa industri ini memiliki potensi yang besar dan sekarang menjadi komoditi yang sangat penting bagi masyarakat. Dalam pasal 3 ayat (1) Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 104 Tahun 2007 Tentang Penyediaan, Pendistribusian dan Penetapan Harga Liquefied Petroleum Gas Tabung 3 Kilogram yang berbunyi : *“Penyediaan dan Pendistribusian LPG tabung gas 3 kg hanya di peruntukkan bagi rumah tangga dan usaha mikro”*.

Golongan masyarakat yang paling banyak mendapatkan LPG bersubsidi adalah mereka yang berasal dari golongan mampu. Berdasarkan Susenas 2008 dan Bank Dunia (2010), 25% kelompok rumah tangga dengan penghasilan (pengeluaran) per bulan tertinggi menerima alokasi subsidi sebesar 77%. Sementara 25% kelompok rumah tangga dengan penghasilan (pengeluaran) per bulan terendah hanya menerima subsidi sekitar 15%. Fakta ini menunjukkan bahwa selama ini pengguna LPG bersubsidi belum tepat sasaran. Dalam hal ini titik tumpunya adalah tidak merata dan tidak tepat sarannya kebijakan dari pemerintah, yang semula direncanakan untuk rumah tangga dan usaha mikro yang memang berkebutuhan akan tetapi implementasinya adalah masyarakat golongan menengah keatas.

Gambar 1.2. Realisasi Subsidi LPG 3 Kg di Indonesia



Sumber : Kementerian ESDM Republik Indonesia, 2021

Dari diagram diatas bahwa sebenarnya realisasi dana yang di keluarkan pemerintah pusat untuk mendanai subsidi LPG 3Kg sering melebihi pagu yang direncanakan, yang mana harusnya bisa memenuhi kebutuhan masyarakat yang membutuhkan subsidi, dan juga dari Kementerian ESDM sangat bekerja keras

supaya kebijakan ini benar-benar maksimal, akan tetapi disinyalir permasalahannya adalah dalam pendistribusiannya yang mungkin kurang tepat sasaran sehingga hasilnya tidak sesuai apa yang direncanakan.

Kabupaten Gresik sebagai salah satu kota di Provinsi Jawa Timur menempati peringkat lima sebagai kabupaten termiskin di Provinsi Jawa Timur. Berdasarkan data BPS setempat, persentase penduduk miskin di Kabupaten Gresik pada tahun 2021 naik sebesar 0,02 persen dari 2020 yakni pada tingkat 12,42 persen atau terdapat sekitar 162 ribu penduduk Kabupaten Gresik yang ada di bawah garis kemiskinan. Jumlah tersebut lebih tinggi dari persentase penduduk miskin di Provinsi Jawa Timur maupun Nasional pada tahun yang sama yaitu 10,59 persen dan 9,71 persen.

Pemerintah Kabupaten Gresik telah melakukan berbagai upaya penanganan kemiskinan di daerahnya melalui program-program dari daerah maupun melalui program dari pemerintah provinsi dan pemerintah pusat, seperti BLT, Raskin dan termasuk subsidi LPG. Akan tetapi jumlah rumah tangga miskin yang ada di Kabupaten Gresik tetap tidak menurun secara signifikan bahkan terjadi peningkatan pada tiga tahun terakhir yakni pada tahun 2019 hingga tahun 2022. Menurut Nainuis (2018) faktor yang mempengaruhi bertambahnya jumlah kemiskinan di kabupaten Gresik ada 3 yaitu jumlah penduduk yang bertambah dan tidak dikendalikan, pengeluaran pemerintah yang kurang efisien untuk menanggulangi kemiskinan, dan jumlah pengangguran yang tinggi di kabupaten Gresik.

Berdasarkan fenomena tersebut maka peneliti tertarik untuk mengkaji mengenai pengaruh tiga kebijakan andalan pemerintah meliputi BLT, Raskin, dan subsidi LPG terhadap penanganan masalah kemiskinan di Kabupaten Gresik, Provinsi Jawa Timur melalui penelitian yang diberi judul “*Pengaruh Penyaluran Blt (Bantuan Langsung Tunai), Raskin (Beras Miskin), Dan Subsidi Lpg 3 Kg Terhadap Jumlah Rumah Tangga Miskin Di Kabupaten Gresik*”

1.2 Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang yang telah disusun, berikut ini merupakan masalah-masalah yang dirumuskan pada penelitian ini

1. Apakah penyaluran Bantuan Langsung Tunai (BLT) berpengaruh terhadap angka kemiskinan di Kabupaten Gresik?
2. Apakah penyaluran Beras Miskin (Raskin) berpengaruh terhadap angka kemiskinan di Kabupaten Gresik?
3. Apakah penyaluran subsidi LPG 3 Kg berpengaruh terhadap angka kemiskinan di Kabupaten Gresik?

1.3 Tujuan

Berdasarkan rumusan masalah yang telah disusun, berikut ini merupakan tujuan yang ingin dicapai oleh peneliti melalui penelitian ini.

1. Mengetahui pengaruh dari penyaluran BLT (Bantuan Langsung Tunai) terhadap jumlah rumah tangga miskin di Kabupaten Gresik
2. Mengetahui pengaruh dari penyaluran Raskin (Beras Miskin) terhadap jumlah rumah tangga miskin di Kabupaten Gresik

3. Mengetahui pengaruh dari penyaluran subsidi LPG 3 Kg terhadap jumlah rumah tangga miskin di Kabupaten Gresik.

1.4 Manfaat

1. Menjadi acuan penelitian selanjutnya mengenai kebijakan – kebijakan pemerintah yang berkaitan dengan efektifitas subsidi
2. Menjadi bahan evaluasi pemerintah Kabupaten Gresik terhadap kebijakan yang dilaksanakan dalam urusan kemiskinan

1.5 Ruang Lingkup

1. Penelitian ini mencakup data time series selama kurun waktu tahun 2008-2020 pada Kabupaten Gresik
2. Variabel yang digunakan dalam penelitian ini adalah Jumlah rumah tangga miskin di Kabupaten Gresik sebagai variabel terikat. Sedangkan variabel bebas adalah Bantuan Langsung Tunai (BLT), Beras Miskin (Raskin), dan Subsidi LPG 3 Kg.